



Analisis Dampak Regulasi, Komitmen Organisasi, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Yudi Kurniawan¹, Ahmad Yamin²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: ykurniawan19761228@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-03-11 Revised: 2025-04-27 Published: 2025-05-02 Keywords: <i>Regulation; Organizational Commitment; Village Financial Management; Village Government Performance.</i>	The purpose of this study is to analyze the impact of regulations, organizational commitment and financial management on the performance of the Village Government in Maluku District, West Sumbawa Regency (KSB). This study uses quantitative methodology and uses descriptive techniques to analyze the data. The research sample consisted of 55 respondents who were employees or workers working in the villages of Maluku District, West Sumbawa Regency (KSB) in this case consisting of 5 villages, namely (1) Maluku, (2) Benete, (3) Bukit Damai, (4) Mantun, and (5) Pasir Putih. The data was analyzed using the Partial Least Square (PLS) method which is included in the Structural Equation Modeling (SEM) domain. The results of the study indicate that regulations, organizational commitment and village financial management have a positive and significant effect on the performance of the Village Government in Maluku District, West Sumbawa Regency (KSB). With clear regulations, support commitment from all members of the organization, and good financial management, the village government is able to increase efficiency and effectiveness in providing services to the community. Thus, it can be concluded that clear regulations, strong organizational commitment, and good financial management contribute positively and significantly to the performance of the village government in Maluku District, West Sumbawa Regency. The synergy between these three factors allows for increased efficiency and effectiveness in providing services to the community, which ultimately supports the achievement of better and more sustainable village development goals.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-03-11 Direvisi: 2025-04-27 Dipublikasi: 2025-05-02 Kata kunci: <i>Regulasi; Komitmen Organisasi; Pengelolaan Keuangan Desa; Kinerja Pemerintah Desa.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak regulasi, komitmen organisasi dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data. Sampel penelitian berjumlah 55 responden yang merupakan pegawai atau karyawan yang bekerja di desa-desa Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam hal ini terdiri dari 5 desa yaitu (1) Maluku, (2) Benete, (3) Bukit Damai, (4) Mantun, dan (5) Pasir Putih. Data dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) yang termasuk dalam domain Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, komitmen organisasi dan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dengan adanya regulasi yang jelas, dukungan komitmen dari seluruh anggota organisasi, serta pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa regulasi yang jelas, komitmen organisasi yang kuat, dan pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat. Sinergi antara ketiga faktor tersebut memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah desa di Indonesia merupakan isu yang semakin penting dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, desa memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan dan

program pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Fitria dan Wibisono, 2020). Namun, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja optimal. Fenomena yang sering terjadi adalah

ketidakmerataan dalam kualitas pelayanan publik di desa-desa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, masih terdapat desa-desa yang mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada disparitas yang signifikan antara desa-desa yang lebih maju dan yang tertinggal. Pada sisi lain, hasil penelitian oleh Mardikanto (2020) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan anggaran desa sangat mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

Selain itu, fenomena korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa juga menjadi isu krusial. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa (KPK, 2020). Kasus ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Penelitian oleh Aisyah (2019) menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa berkontribusi pada rendahnya kinerja pemerintah desa.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja pemerintah desa adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian oleh Hidayat (2021) menunjukkan bahwa masyarakat sering merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa. Hal ini berujung pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas lembaga desa menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa, berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah. Namun, hasilnya masih belum maksimal. Penelitian oleh Fitriani (2022) menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilaksanakan, implementasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh masih kurang optimal di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa.

Menurut penelitian oleh Wisastrawan (2019), partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa masih rendah. Masyarakat sering merasa tidak

dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Regulasi yang ada juga cenderung bersifat top-down, sehingga seringkali mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik setiap desa. Penelitian oleh Putra (2021) menyoroti perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dalam penyusunan regulasi pengelolaan keuangan desa. Dengan melibatkan stakeholders lokal, regulasi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat desa.

Lebih lanjut, rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Masyarakat yang tidak terlibat cenderung tidak memiliki informasi yang cukup tentang alokasi dan penggunaan dana desa, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengawasan mereka terhadap pemerintah desa. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Imron (2023), yang menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan cenderung lebih memahami dan mendukung program-program yang dijalankan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, regulasi yang tidak fleksibel sering kali membatasi inovasi dan kreativitas pemerintah desa dalam merespons kebutuhan lokal. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa desa yang memiliki kebebasan dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi lokal mereka cenderung lebih berhasil dalam mengelola keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.

Menurut Ariana dkk. (2021), diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif. Pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan keuangan yang baik perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan melibatkan

masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan keuangan, diharapkan akan tercipta iklim saling percaya antara pemerintah desa dan warganya. Menurut Elysyra dkk. (2020), hal ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat terhadap program-program pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah komitmen organisasi dari para aparatur pemerintah desa. Fakta menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dan keterlibatan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Lestari dan Ayu (2021) menemukan bahwa kepala desa dan perangkatnya yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi cenderung lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran. Sebaliknya, desa-desa dengan tingkat komitmen yang rendah sering kali mengalami masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan dari Veronika dan Basri (2023), yang mencatat bahwa kurangnya komitmen dari aparat desa dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, bahkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Penelitian oleh Karim dkk. (2019) menyebutkan bahwa banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan, yang berpengaruh pada kemampuan mereka untuk mengelola anggaran desa secara efektif. Ketidapahaman ini sering kali berakar pada kurangnya pelatihan dan pendidikan formal mengenai pengelolaan keuangan, sehingga komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka pun menjadi berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan formal dapat memperbaiki komitmen organisasi dan, pada gilirannya, meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, ada juga faktor budaya organisasi yang berpengaruh terhadap komitmen para aparatur desa. Menurut penelitian oleh Yunita dkk. (2022), budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan komunikasi yang baik di antara perangkat desa dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan bersama. Ketika aparatur desa merasa bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang positif dan saling mendukung, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk mencapai target-target

yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Budaya organisasi yang baik akan menciptakan semangat tim yang kuat dan mendorong setiap anggota untuk berkontribusi secara maksimal.

Kinerja pemerintah desa memegang peran krusial dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus terhadap kinerja pemerintah desa semakin menguat seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun, meskipun terdapat berbagai kebijakan yang mendukung, pelaksanaan program dan layanan publik di tingkat desa masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Kecamatan Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pemanfaatannya belum optimal. Sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya dukungan infrastruktur dan akses pasar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan realisasi kinerja pemerintah desa dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Salah satu fenomena yang patut diperhatikan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian lokal menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa masih tergolong rendah. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah desa, karena kurangnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terakomodasi. Oleh karena itu, kinerja pemerintah desa dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa juga menjadi perhatian serius. Laporan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa, yang dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas pemerintah desa. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Di bidang sosial, Kecamatan Maluku juga menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hasilnya belum sesuai harapan. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat dasar masih relatif tinggi, sementara akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Kinerja pemerintah desa dalam menangani isu-isu ini perlu dievaluasi secara mendalam agar dapat merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, berbagai fakta dan fenomena yang terjadi di Kecamatan Maluku mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah desa masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pembangunan desa, implementasinya di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan masyarakat, sehingga diperlukan upaya lebih serius untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja pemerintah desa di daerah ini guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan masalah ini melalui judul penelitian yang relevan yaitu, "Analisis Dampak Regulasi, Komitmen Organisasi, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)".

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini memungkinkan pengujian hubungan antar variabel secara numerik dan objektif menggunakan alat statistik (Sugiyono, 2021). Penelitian ini berfokus pada hubungan antara regulasi (X1), komitmen organisasi (X2), dan pengelolaan keuangan desa (X3) sebagai variabel independen, terhadap kinerja pemerintah desa (Y) sebagai variabel dependen (Creswell, 2022). Tujuan dari pendekatan asosiatif ini adalah

untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terukur dan sistematis.

Penelitian ini dilaksanakan di lima desa dalam wilayah Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Maluku, Benete, Bukit Damai, Mantun, dan Pasir Putih. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas serta tantangan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pelaksanaan penelitian berlangsung dari Februari hingga Mei 2025 untuk memberikan waktu yang cukup dalam mengumpulkan data secara menyeluruh. Peneliti berupaya memastikan bahwa dinamika dan kondisi faktual di lapangan dapat direpresentasikan dengan baik selama periode waktu tersebut.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai pemerintahan desa di lima desa tersebut dengan total 55 orang (Sekaran & Baougie, 2020). Teknik total sampling digunakan untuk menentukan sampel, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden (Cooper & Schindler, 2021; Creswell, 2022). Teknik ini dipilih untuk meminimalkan bias dan menjamin bahwa sampel benar-benar merepresentasikan populasi secara utuh. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dan berasal dari sumber primer melalui kuesioner dengan skala Likert 1–4 (Arikunto, 2019).

Untuk mendefinisikan variabel secara operasional, peneliti merinci indikator untuk masing-masing variabel dengan mengacu pada literatur relevan. Regulasi diukur melalui indikator seperti kejelasan dan kepatuhan terhadap regulasi (Stiglitz, 2020), komitmen organisasi melalui tiga dimensi utama (Robbins & Judge, 2013), dan pengelolaan keuangan desa melalui delapan indikator seperti kualitas perencanaan dan transparansi laporan (Dewi, 2019). Sementara itu, kinerja pemerintah desa diukur berdasarkan pedoman Kemendagri (2018), mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan ketertiban serta keamanan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS v3.2.9, yang dinilai cocok karena dapat bekerja dengan sampel kecil dan tidak memerlukan asumsi distribusi normal (Hair et al., 2017). Model pengukuran (*outer model*) diuji melalui validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability (Ghozali & Latan, 2015). Untuk model struktural

(inner model), pengujian dilakukan dengan melihat nilai R-square, F-square, dan *Goodness of Fit* (GoF), serta pengujian hipotesis dengan teknik bootstrapping pada tingkat signifikansi 0,05 (Hair et al., 2017; Ghozali & Latan, 2015). Semua tahapan ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan validitas model yang digunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap kinerja pemerintah desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penilaian model adalah tahap krusial dalam menilai kesesuaian model yang telah dibuat dengan data yang tersedia. Proses evaluasi ini mencakup penggunaan berbagai metrik dan teknik tertentu untuk menilai sejauh mana model tersebut sejalan dengan data empiris yang ada (Arikunto, 2019). Langkah-langkah analisis SEM-PLS adalah sebagai berikut:

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model luar dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model tersebut. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam penilaian model luar meliputi Cronbach's alpha, validitas diskriminan, validitas konvergen, dan composite reliability (Hair et al., 2017).

a) Uji Convergent Validity

Variabel dianggap cukup memadai apabila nilai AVE (*Average Variance Extracted*) dari setiap indikator lebih besar dari 0,5. Selain itu, hasil estimasi model yang menggunakan metode PLS menunjukkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai *Outer Loading*

Variabel Konstruk	AVE	Keterangan
Regulasi (X1)	0.530	Valid
Komitmen Organisasi (X2)	0.652	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa (X3)	0.530	Valid
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0.736	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan referensi pada Tabel 1, *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk regulasi, komitmen organisasi, pengelolaan keuangan desa, dan kinerja pemerintah desa semuanya melampaui ambang batas 0,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel konstruk di dalam model dianggap valid.

b) Uji Discriminant Validity

Seperti yang dijelaskan oleh Hair dkk. (2017) bahwa uji validitas diskriminan merupakan metode statistik yang berguna untuk menentukan sejauh mana konstruk atau variabel dalam sebuah model penelitian berbeda secara statistik satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 yang terletak di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Fornell-Larcker Criterion

Variabel Konstruk	X1	X2	X3	Y
Regulasi (X1)	0.858			
Komitmen Organisasi (X2)	0.544	0.808		
Pengelolaan Keuangan Desa (X3)	0.546	0.661	0.728	
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0.521	0.626	0.582	0.728

Sumber: data diolah, 2025

Dari data yang tertera pada Tabel 2, hubungan antara variabel konstruk menunjukkan validitas diskriminan yang tinggi, terutama pada Regulasi (X1) dengan nilai 0.858. Nilai signifikan juga terlihat pada Komitmen Organisasi (X2) dengan 0.808, Pengelolaan Keuangan Desa (X3) dengan 0.728, dan Kinerja Pemerintah Desa (Y) dengan 0.626, di mana nilai diagonal masing-masing konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai non-diagonalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk dapat dibedakan dengan jelas dari yang lainnya, mendukung keandalan model penelitian dan menunjukkan hubungan yang terpisah antara variabel-variabel yang diteliti. Temuan ini penting untuk analisis lebih lanjut mengenai dampak regulasi, komitmen organisasi, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah desa.

c) Uji Composite Reliability

Composite reliability dan Cronbach's alpha dapat menilai reliabilitas konstruk dengan menggunakan indikator. Menurut Ghozali & Latan (2015), kedua teknik tersebut harus memiliki nilai reliabilitas di atas 0,7 yang mengindikasikan model yang dapat dipercaya.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Regulasi (X1)	0.818	0.705
Komitmen Organisasi (X2)	0.848	0.732
Pengelolaan Keuangan Desa (X3)	0.899	0.871
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0, 893	0.823

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3, setiap konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang ditetapkan. Semua konstruk menunjukkan nilai *composite reliability* (CR) dan *Cronbach's alpha* (α) di atas ambang batas 0,60, yang menandakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur setiap konstruk telah memenuhi standar reliabilitas yang ditetapkan untuk penelitian ini. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk memajukan pengolahan data dan mengevaluasi model penelitian selanjutnya.

2. Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural, atau Inner Model, memprediksi hubungan kausalitas variabel laten, menurut Ghazali dan Latan (2015). Dalam model indikator reflektif ini, konstruk atau variabel laten menyebabkan indikatornya berubah.

a) Uji *R-Square* (R^2)

Analisis *R-Square*, juga dikenal sebagai uji determinasi, mengukur pengaruh keseluruhan faktor independen terhadap variabel dependen (Hair et al., 2017).

Tabel 4. Hasil Pengujian *R-Square*

	R-square	Adjusted R-square
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0,385	0,366

Sumber: data diolah, 2025

Hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai nilai *R-square* sebesar 0,385 menunjukkan bahwa sekitar 38,5% variasi dalam kinerja pemerintah desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sementara itu, nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,366 mengindikasikan bahwa setelah mempertimbangkan

jumlah variabel yang dimasukkan dalam model, proporsi variasi yang dapat dijelaskan menjadi 36,6%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontribusi signifikan dari variabel-variabel tersebut, masih terdapat sekitar 61,5% variasi dalam kinerja pemerintah desa yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Temuan ini penting untuk memahami sejauh mana regulasi, komitmen organisasi, dan pengelolaan keuangan desa berkontribusi terhadap efektivitas kinerja pemerintah desa, serta menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berpengaruh.

b) Uji *F-Square* (F^2)

Ketika menggunakan model Partial Least Squares (PLS), analisis *F-Square* digunakan untuk menentukan sejauh mana sebuah konstruk berkontribusi pada variabel laten yang terkait dengannya. Kontribusi konstruk yang lebih kuat terhadap nilai *F-Square* ditunjukkan dengan nilai *F-Square* yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut: pengaruh yang lebih besar dari 0.02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0.15 menunjukkan pengaruh yang moderat, dan 0.35 menunjukkan pengaruh yang besar.

Tabel 5. Hasil Pengujian *F-Square*

Konstruk Variabel	<i>F-Square</i>	Kategori
Regulasi (X1)	0,045	Kecil
Komitmen Organisasi (X2)	0,041	Kecil
Pengelolaan Keuangan Desa (X3)	0,058	Kecil

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 5 menyajikan hasil uji *F-Square* yang mengukur dampak variabel konstruk terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Nilai *F-Square* untuk variabel Regulasi (X1) adalah 0,045, Komitmen Organisasi (X2) 0,041, dan Pengelolaan Keuangan Desa (X3) 0,058, yang semuanya tergolong kecil. Meskipun pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja pemerintah desa relatif rendah, kontribusi mereka tetap penting dan tidak boleh diabaikan dalam konteks keseluruhan. *F-Square*

berfungsi sebagai indikator untuk menilai seberapa besar perubahan dalam kinerja pemerintah desa dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel independen tersebut.

c) Uji Goodness of Fit (GoF)

Model *Goodness of Fit* (GoF) dikembangkan untuk menilai kesesuaian dan kegunaan metodologi penelitian. Penilaian GoF terdiri dari tiga tingkatan: nilai 0,1 dianggap rendah, nilai 0,25 dianggap sedang, dan nilai 0,38 diklasifikasikan sebagai tinggi (Hair et al., 2017). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana model tersebut sesuai dengan data.

Tabel 6. Hasil Uji GoF

Variabel Konstruk	Nilai Communnality	R-Square
Regulasi (X1)	0,220	-
Komitmen Organisasi (X2)	0,318	-
Pengelolaan Keuangan Desa (X3)	0,399	-
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0,450	0,385

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai AVE adalah 0,347 dan rata-rata nilai R-square adalah 0,877. Dengan demikian, perhitungan nilai GoF menjadi:

$$GoF = \sqrt{(R^2 \times \text{Com AVE})}$$

$$GoF = \sqrt{(0,385 \times 0,347)}$$

$$GoF = \sqrt{0,133795}$$

$$GoF = 0,366$$

Dalam penelitian ini, nilai *Goodness of Fit* (GoF) diperoleh sebesar 0,366, yang menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan kelayakan model berada pada kategori sedang. Nilai ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik dalam merepresentasikan data yang ada, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

d) Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Metode resampling *bootstrapping* digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menganalisis hubungan antara variabel independen (konstruk eksogen) dan variabel dependen (konstruk endogen), serta

antar konstruk endogen. Dengan tingkat signifikansi 0,05, nilai P-Value menunjukkan kemungkinan 5% bahwa hasilnya bersifat acak, sementara T-Statistik 1,96 menjadi batas penting untuk signifikansi statistik; hipotesis diterima jika T-Statistik lebih dari 1,96 dan P-Value kurang dari 0,05 (Ghozali dan Latan, 2015). Sebaliknya, jika T-Statistik kurang dari 1,96 dan P-Value lebih besar dari 0,05, hipotesis harus ditolak. Oleh karena itu, *bootstrapping* sangat penting dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menilai kekuatan hubungan antara karakteristik eksogen dan endogen melalui analisis statistik yang ketat dan dapat diandalkan.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Pengaruh Antar Variabel	Original Sampel	T-Statistik	P-Values
Regulasi (X1) -> Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0.223	2.967	0.015
Komitmen Organisasi (X2) -> Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0.231	2.703	0.018
Pengelolaan Keuangan Desa (X3) -> Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0.263	2.287	0.023

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 7, interpretasi dari uji Path Coefficients menggunakan PLS *Bootstrapping* adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa regulasi (X1) memiliki koefisien beta sebesar 0,223, yang menunjukkan pengaruh positif. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,967, yang lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978, dengan P-Value sebesar 0,015, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dalam hal ini hipotesis pertama (H1) diterima dan H01 ditolak.

- 2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa komitmen organisasi (X2) memiliki koefisien beta sebesar 0,231, yang menunjukkan pengaruh positif. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,703, yang lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978, dengan P-Value sebesar 0,018, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dalam hal ini hipotesis pertama (H2) diterima dan H02 ditolak.
- 3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pengelolaan keuangan desa (X3) memiliki koefisien beta sebesar 0,263, yang menunjukkan pengaruh positif. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,287, yang lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978, dengan P-Value sebesar 0,023, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dalam hal ini hipotesis pertama (H3) diterima dan H03 ditolak.

B. Pembahasan

1. Regulasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, regulasi (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan koefisien beta sebesar 0,223. Hasil uji statistik memperkuat temuan ini melalui nilai t-statistik 2,967 yang melebihi t-tabel 1,978, serta P-Value 0,015 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini tidak hanya menolak hipotesis nol (H01) tetapi juga mengkonfirmasi bahwa kualitas regulasi berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur desa. Dengan kata lain, semakin baik regulasi yang

dirumuskan dan diterapkan, semakin efektif pula pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa di Kecamatan Maluku, KSB. Regulasi yang jelas dan terstruktur mampu menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Regulasi yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang efektif. Ketika regulasi dirancang dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, aparatur pemerintah desa memiliki pedoman yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Regulasi yang baik menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, terutama di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Regulasi yang diterapkan secara jelas dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya aturan yang terstruktur, setiap aparatur desa memiliki pedoman yang jelas dalam bekerja, mulai dari tata kelola administrasi, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini meminimalisir potensi kesalahan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakefektifan dalam menjalankan program-program desa. Di Kecamatan Maluku, implementasi regulasi yang baik telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan program pembangunan berbasis masyarakat.

2. Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa komitmen organisasi (X2) memiliki koefisien beta sebesar 0,231, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,703, yang lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978, dengan P-Value sebesar 0,018, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif

dan signifikan, sehingga hipotesis pertama (H2) diterima dan H02 ditolak. Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa, semakin baik pula kinerja pemerintah desa tersebut, menegaskan pentingnya komitmen dalam mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan publik. Komitmen organisasi mencerminkan keterikatan, loyalitas, dan dedikasi aparatur desa terhadap tugas, nilai, dan tujuan organisasi. Ketika aparatur desa memiliki komitmen yang tinggi, mereka cenderung bekerja lebih efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.

Komitmen organisasi merupakan faktor penting yang menentukan kinerja aparatur pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat komitmen yang dimiliki oleh aparatur desa, semakin baik pula kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Komitmen ini mencerminkan keterikatan, loyalitas, dan dedikasi aparatur desa terhadap tugas, nilai, serta tujuan organisasi. Aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, memiliki semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa sekadar menjalankan rutinitas. Di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), perbedaan tingkat komitmen organisasi dapat terlihat dalam variasi kinerja pemerintah desa, di mana desa yang memiliki aparatur dengan komitmen tinggi cenderung lebih maju dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta program pembangunan desa.

Ketika aparatur desa memiliki tingkat komitmen yang tinggi, mereka akan lebih efektif dalam bekerja, bertanggung jawab terhadap tugasnya, serta berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Selain itu, aparatur desa yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi akan lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi demi kepentingan masyarakat. Di beberapa desa di Kecamatan Maluk, aparatur desa dengan komitmen tinggi menunjukkan inisiatif dalam meningkatkan pelayanan publik, misalnya dengan mengadopsi sistem administrasi berbasis digital untuk mempercepat pengurusan dokumen

kependudukan dan perizinan usaha. Langkah-langkah inovatif seperti ini hanya dapat terjadi ketika aparatur memiliki kepedulian dan loyalitas terhadap kemajuan desa mereka.

Dampak positif dari komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah desa dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keberhasilan program pembangunan desa. Di desa-desa dengan aparatur yang memiliki komitmen tinggi di Kecamatan Maluk, implementasi program seperti penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan lebih efektif karena mereka mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, di desa yang tingkat komitmennya rendah, sering ditemukan kendala seperti keterlambatan dalam penyelesaian tugas, pelayanan publik yang kurang optimal, serta rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, meningkatkan komitmen organisasi di kalangan aparatur desa menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan desa di Kecamatan Maluk dapat berjalan lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, pengelolaan keuangan desa (X3) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Koefisien beta sebesar 0,263 dan nilai t-statistik sebesar 2,287, yang lebih besar dari t-tabel 1,978, serta P-Value sebesar 0,023 yang jauh lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa hipotesis pertama (H3) diterima dan H03 ditolak. Ini berarti semakin baik pengelolaan keuangan desa, semakin tinggi pula kinerja pemerintah desa tersebut. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang efektif berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja pemerintah desa di wilayah ini. Pengelolaan keuangan desa yang efektif mencakup perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif memastikan bahwa setiap rupiah dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Perencanaan keuangan yang baik melibatkan musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan rencana kerja desa memastikan tidak ada penyalahgunaan dana atau pemborosan anggaran. Pengawasan yang ketat, baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat, memastikan bahwa dana tidak diselewengkan. Di beberapa desa di Kecamatan Maluku, transparansi dalam pengelolaan keuangan telah diterapkan melalui papan informasi anggaran dan sistem pelaporan terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Ketika keuangan desa dikelola dengan baik, sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk berbagai program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, di beberapa desa di Kecamatan Maluku, penggunaan Dana Desa yang tepat telah membantu pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Desa yang mengelola anggaran dengan baik juga mampu memberikan insentif bagi aparatur desa sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka. Sebaliknya, desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan, seperti kurangnya transparansi atau tidak tertib dalam pelaporan keuangan, cenderung menghadapi berbagai masalah, seperti keterlambatan pembangunan dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan serta pengawasan yang ketat perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola oleh pemerintah

desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa poin berikut sebagai kesimpulan dari penelitian ini:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, regulasi (X1) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan koefisien beta sebesar 0,223. Hasil uji statistik mencatat nilai t-statistik sebesar 2,967, yang lebih besar dari t-tabel 1,978, serta P-Value sebesar 0,015 yang jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima dan H01 ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan terstruktur menjadi pedoman utama bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. Regulasi yang baik tidak hanya memastikan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja dan mendorong pelayanan publik yang lebih berkualitas. Di Kecamatan Maluku, penerapan regulasi yang ketat telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa serta program pembangunan berbasis masyarakat.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, komitmen organisasi (X2) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan koefisien beta sebesar 0,231. Hasil uji statistik mencatat nilai t-statistik sebesar 2,703, yang lebih besar dari t-tabel 1,978, serta P-Value sebesar 0,018 yang jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima dan H02 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat keterikatan, loyalitas, dan dedikasi tinggi terhadap tugas dan nilai organisasi cenderung bekerja lebih efektif dan bertanggung jawab. Komitmen yang tinggi mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa setiap program

pembangunan desa berjalan dengan baik. Di Kecamatan Maluku, desa-desa dengan aparaturnya yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi mampu mengelola administrasi dengan lebih baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, pengelolaan keuangan desa (X3) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan koefisien beta sebesar 0,263. Hasil uji statistik mencatat nilai t-statistik sebesar 2,287, yang lebih besar dari t-tabel 1,978, serta P-Value sebesar 0,023 yang jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima dan H03 ditolak. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Pengelolaan keuangan yang efektif mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Ketika keuangan desa dikelola dengan baik, anggaran dapat dialokasikan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik. Di beberapa desa di Kecamatan Maluku, sistem transparansi dalam pengelolaan Dana Desa telah diterapkan melalui sistem informasi desa berbasis digital, yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut disampaikan beberapa rekomendasi atau saran yang diharapkan dapat berguna untuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian ini di masa mendatang, yaitu:

1. Pemerintah desa di Kecamatan Maluku perlu memperkuat regulasi dengan memastikan aturan yang berlaku lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh aparaturnya desa maupun masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus selaras dengan kebutuhan lokal dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika sosial serta perkembangan kebijakan nasional.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada aparaturnya desa dan masyarakat agar regulasi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja pemerintah desa.

2. Aparaturnya pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dan motivasi yang berkelanjutan guna meningkatkan komitmen organisasi mereka terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pemerintah daerah dapat mengadakan program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan kepemimpinan, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi desa yang lebih baik. Selain itu, pemberian insentif atau penghargaan bagi aparaturnya desa yang menunjukkan dedikasi tinggi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan semangat kerja serta loyalitas terhadap organisasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.
3. Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, pemerintah desa di Kecamatan Maluku perlu menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, aparaturnya desa juga perlu mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan keuangan yang lebih profesional agar penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Beberapa Desa di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-135.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of rural studies*, 79, 382-394.

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati, W. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29-47.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Penatausahaan Keuangan Desa: Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Desa 2021*. Jakarta: BPS.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2016). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2019). Pengaruh GCG terhadap kinerja pengelolaan dana desa dengan moderasi sistem pengendalian internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(4), 425-444.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2021). *Metode penelitian bisnis (Edisi 14)*. McGraw-Hill Education.
- Creswell, J. W. (2022). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif (Edisi 5)*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, S. I. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*. Desa Pustaka Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Elsyra, N., Albadry, S. A., & Istianingsih, N. (2020). Efektivitas Pembangunan Desa Pada Pelaksanaan Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Desa Di Kabupaten Bungo. *EDUSAINTEK*, 4.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85-98.
- Fitriani, F. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Pelatihan: Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Pembangunan Desa*, 8(1), 45-60.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunningham, N., & Sinclair, D. (2005). *Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection*. Journal of Law and Society.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Heru, S. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa*. IPDN Press.
- Hidayat, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 201-215.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2014). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Imron, A. (2023). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kebijakan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Desa Di Kecamatan Pemalang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 6(1), 1-16.
- Indrawati, N. K., & dkk. (2023). *Keuangan Personal: Perencanaan Investasi dan Pajak*. Universitas Brawijaya Press.

- Josep. (2021). *Konsep Dasar Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa*. Indocamp.
- Jufrizen. (2020). *Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan dengan Etika Kerja sebagai Variabel Moderating*. UMSU Press.
- Karim, S. A. H., Lahay, M., Monoarfa, Z., Adam, R. P., & Suardi, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kec. Ampa Kota Kab. Tojo Una Una). *Agribusiness Journal*, 13(2), 18-24.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *B08_Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*. 1540, 1–20.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Laporan tahunan pengelolaan dana desa 2021*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan Tahunan 2020: Pemberantasan Korupsi di Sektor Desa*. Jakarta: KPK.
- Kumar, R. (2014). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (4th ed.)*. London, UK: SAGE Publications.
- Kusuma, D., & Ardhiarisa, O. (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 45-54.
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101-116.
- Mahadwartha, P. A., Silalahi, M. A. R., Tanaya, O., Tan, N. C., & Schand, V. Y. (2023). *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik Pengelolaan Keuangan*. Penerbitan & Publikasi Ilmiah (PPI) Universitas Surabaya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardikanto, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(4), 89-102.
- Moh, F. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57-64.
- Nasution, D. A. D., Mustafa, M., & Damanik, A. F. (2024). Detailed Exploration Of Feasibility Study Of Siskeudes Implementation In Pemasang Serai Village, Langkat District. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 3(1).
- Nurcholis, H. (2011). *Pemerintahan Desa dan Desa Adat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhazizal, M., Basri, Y. M., & Nasir, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance Sebagai Pemeditasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 80-92.
- Ogus, A. (2004). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Hart Publishing.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95-111.
- Pratama, N., Herawati, N., Fariantin, E., Khotmi, H., Maqsudi, A., Murjana, I. M., Jusmarni, Anwar, Rachmawati, T., Hariyanti, N., Sri Umiatun Andayani, D. A. N., & Nursansiwati, D. A. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Penerbit Seval.
- Pratama, D., Lestari, P., & Pratiwi, U. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desadalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Wilayah Kabupaten Banyumas Bagiantimur).

- In *International Student Conference on Accounting and Business* (Vol. 1).
- Qorni, F. (2020). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi, Dan Internal Locus Of Control Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen* (Doctoral dissertation, Universitas Putra Bangsa).
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2020). *Pemerintah Desa*. Perpustakaan Amir Machmud.
- Rizqi, R. M., & Pratiwi, A. (2024). The impact of financial factors on the disclosure of corporate social responsibility. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 9(02).
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior (15th ed.)*. Pearson.
- Rumawas, W. (2023). *Komitmen Organisasional dan Perilaku Keinginan Keluar Karyawan*. Universitas Sam Ratulangi Press.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *Int. J. Sci. Technol. Res*, 8(8), 1058-1063.
- Ruqayyah, A. (2023). *Manajemen Keuangan Syariah*. Penerbit Widina Bandung.
- Safitri, A. E., Pramono, J., & Istiyani, A. (2023). Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal Imagine*, 3(1), 1-11.
- Sari, J. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(3), 127-140.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Penelitian metodologi untuk bisnis (Edisi 7)*. McGraw-Hill Education.
- Setiya, T., & Panjaitan, R. P. (2020). *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Shaleh, M., & Firman. (2018). *Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*. Deepublish.
- Sofyani, H., & Ardiyanto, I. (2022). Determinan Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 149-165.
- Stiglitz, J. E. (2020). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Kerja Sosial: Spektrum Pemikiran*. Alfabeta.
- Sutoro, E. (2014). *Membangun Desa Partisipatif*. IRE Press.
- Tietenberg, T. H., & Lewis, L. (2016). *Environmental and Natural Resource Economics (10th ed.)*. Pearson.
- Veronika, Y., & Basri, Y. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 19(2), 91-105.
- Widhiandono, G., & Widhiandono, S. (2023). *Komitmen Organisasi: Tinjauan Kasus Berbagai Organisasi Publik dan Swasta*. Universitas Ahmad Dahlan Press.
- Wisastrawan, K. T. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Yunita, N. A., Yusra, M., & Rais, R. G. P. (2022). Pengaruh Asimetri Informasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 11(1), 5-10.
- Yusuf, R. M., & Syarif, D. (2017). *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi*. Nas Media Pustaka.